



Analisis Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Yohanes Susanto¹⁾; Romdana Yahya²⁾

Study Program Of Administration Publik

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ yohannessusanto31@gmail.com; ²⁾ Romdanayahya123@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]
Revised [05 Juni 2022]
Accepted [28 Juli 2022]

KEYWORDS

Kebijakan, Bantuan Sosial, Pandemi Covid-19

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Pandemi covid -19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana teknik pengumpulan data diperoleh dengan data primer dan sekunder berupa artikel, jurnal, berita, serta studi kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan kebijakan penyaluran program bantuan soasial kepada masyarakat akibat pendemi covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu melalui peranan dari pemerintah kelurahan yang bekerjasama dengan jajarannya meliputi RT, RW serta karang taruna dan ketertiban dari masyarakat sudah berjalan dengan sangat baik dan tepat sasaran.

ABSTRACT

This study aims to determine the Policy for Distribution of Social Assistance Programs to the Community Due to the Covid-19 Pandemic in the Panorama Village, Bengkulu City, the type of research carried out is descriptive qualitative research, where data collection techniques are obtained with primary and secondary data in the form of articles, journals, news, and other literature studies related to this research. Based on the results of research related to the policy of distributing social assistance programs to the community due to the Covid-19 pandemic in the Panorama Village, Bengkulu City through the role of the sub-district government in collaboration with their staff including RT, RW and youth organizations and public order has been running very well and on target..

PENDAHULUAN

Sejak kasus pandemi Covid 19 mening kat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul ditengah masyarakat, tak dapat dipungkiri jika pandemi covid 19 telah hampir melumpuhkan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek dan menyebar hingga keberbagai daerah seperti halnya masuk ke kota Bengkulu.

Dengan adanya pandemi covid 19 ini sehingga pemerintah di Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar dari rumah bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus penanganan covid -19, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, pemberlakuan physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar.

Di Indonesia sendiri dengan adanya pandemi covid-19 hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan pengangguran dan angka kemiskinan meningkat dimana para pelaku UMKM memutuskan hubungan kerja karyawannya (PHK) sebagai antisipasi penutupan usaha dalam jangka waktu yang belum ditentukan, tidak berhenti disini saja para pekerja sektor informalpun begitu sangat dirugikan akibat pandemi covid-19 ini.

Maka dari itu sebagai bentuk usaha dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi covid-19, pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah menyiapkan dana ratusan triliun guna membantu

masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, terutama untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Beberapa program misalnya pemerintah membagi dua kategori yaitu program non-reguler dan program reguler. Program reguler seperti bantuan langsung tunai dana desa, bansos sembako, bantuan sosial tunai dan pembebasan biaya listrik sedangkan bantuan dalam bentuk program reguler meliputi kartu prakerja, penambahan peserta program keluarga berencana dan kartu sembako.

Sebagai mininya Indonesia yang ada dalam Provinsi Bengkulu Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu memiliki 31 satu RT (Rukun Tetangga) dan 9 RW (Rukun Warga) dengan jumlah penduduk laki-Laki 7.548 dan Perempuan 7.153 dengan total 14.701 (Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu). Jika dilihat kepadatan jumlah penduduk yang ada tidak mungkin kepala kelurahan dapat bekerja sendiri dalam penyaluran bantuan program pemerintah maka dari itu perlu dukungan dari jajarannya melalui RT/RW yang ada guna mensukseskan program bansos yang ada dimasa pandemi ini.

Untuk mewujudkan agar program ini tepat sasaran maka peran dari pada pemimpin dalam hal ini Kepala Kelurahan beserta jajarannya sangat besar sekali, agar bantuan-bantuan sosial tersebut sampai ditangan rakyat, karena kepala kelurahan dan jajarannya seperti RT dan RW langsung bersentuhan dan paling dekat dengan lapisan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dasar UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah pasal 229 disebutkan bahwa pemerintah kelurahan disebutkan bahwa pemerintah kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kelurahan beserta jajarannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

LANDASAN TEORI

Analisis kebijakan

Menurut pendapat William Dunn dalam Purnomo (2014:43) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu terapan dengan memakai metode untuk meneliti dan memberikan pendapat, untuk membuat serta mentransformasikan suatu informasi yang selaras dengan kebijakan yang dibuat dalam rangka untuk mengatasi masalah yang menjadi bahan kebijakan.

Sedangkan menurut Weimer dan Vinning dalam Meutia (2017;17) menjelaskan bahwa analisis kebijakan sebagai suatu nasihat yang berorientasi pelanggaran yang relevan dengan keputusan-keputusan publik yang didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus utama dari analisis kebijakan publik yaitu menjelaskan berbagai pilihan atau alternatif dan memilih pilihan yang terbaik yang digunakan untuk dipertimbangkan sebagai suatu kebijakan yang nantinya akan ditetapkan.

Bantuan sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk disini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterima langsung kepada orang yang bersangkutan.

Sedangkan menurut peraturan menteri keuangan, 2015 menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- e) Pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan
- f) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan
- g) Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan

- h) Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat
- i) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Covid-19

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut covid-19, virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut sampai pada kematian.

Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah China lainnya bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara diluar negeri menepakan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk pencegahan virus corona.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 229 tentang otonomi daerah, bahwa kepala kelurahan merupakan pimpinan dari pemerintahan kelurahan yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam berlangsungnya setiap kegiatan di kelurahan tersebut. Sehingga diharapkan peranan kepala kelurahan beserta jajarannya seperti RT/RW dalam menunjang berlangsungnya kegiatan dalam pembagian dan pendistribusian bansos kepada masyarakat pada masa pandemi ini agar tepat sasaran guna menghindari permasalahan dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. menurut Punaji (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek, apak orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kat, dimana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggabarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan serta data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan.

Begitu juga dengan penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana analisis kebijakan penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat lokasi penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Panorama Kecamatan SingaranPati Kota Bengkulu. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan daerah tersebut dapat dijangkau dan dekat dengan pusat kota, serta pemerintahan kelurahan sangat terbuka.

Sumber Data

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pembahasan suatu masalah mutlak membutuhkan data yang cukup, baik secara primer maupun secara sekunder agar pembahasan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah disediakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam bentuk buku, jurnal, studi kepustakaan dan lain-lain.

Populasi

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah masyarakat penerima bansos di Kelurahan Panorama kecamatan Kingaran Pati Kota Bengkulu jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti.

Sampel

Sampel Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini diambil karena penelitian ini tidak mungkin diteliti seluruh anggota populasi masyarakat.

Pencarian sampel ini ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \left[\frac{z_{\alpha/2} \cdot 2\delta}{e} \right]^2$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
 $Z_{\alpha/2}$ = nilai tabel normal
 e = standar error
 σ = standar deviasi populasi

Tingkat kepercayaan dalam penelitian ini sebesar 95% dengan standar error ditetapkan sebesar 5% (0,05), maka nilai $Z_{\alpha/2} = 1,96$ dan standar deviasi populasi adalah sebesar 0,25, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \left[\frac{1,96 \cdot 3,25}{0,05} \right]^2 = \left[\frac{0,49}{0,05} \right]^2 = [9,8]^2$$

= 96,04, sampel \pm 100 orang.

Berdasarkan perhitungan sampel di atas maka diperoleh jumlah sampel sebesar 96 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 orang dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang lebih representatif.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling. Menurut Sugiyono (2014) non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode nonprobability sampling yang digunakan adalah accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Teknik pengumpulan data

Untuk membahas atau menganalisis permasalahan yang bersifat ilmiah, agar diperoleh hasil yang akurat dan valid maka perlu adanya penelitian terhadap objek secara cermat dan terarah sehingga dapat mencapai sasaran penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Studi pustaka (Library Research) adalah pengumpulan informasi sebagai landasan teoritis yang diperlukan dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan kontak langsung dengan objek penelitian untuk mendapatkan sebagai informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, ada beberapa cara yang digunakan, antara lain :
 - a) Pengamatan (observation), yaitu mengumpulkan data dan informasi atas pengamatan langsung ke obyek yang diteliti sehingga dapat diketahui dan diperoleh data-data dan informasi yang diperlukan.
 - b) Kuisisioner, yaitu teknik untuk mendapatkan data primer dengan menyebarkan pertanyaan
 - c) Wawancara (interiew) merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi efektif secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan berkaitan kebijakan penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu melalui peranan dari pemerintah kelurahan yang bekerjasama dengan jajarannya meliputi RT, RW serta karang taruna sebagai pemimpin di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan sangat baik dan tepat sasaran, dimana Mekanisme dalam pembagian bantuan program non-reguler dan bantuan program reguler adalah melalui beberapa proses mulai dari pendataan di wilayah RT dan RW, lalu Proses Konsolidasi dan Verifikasi berdasarkan data administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil dan yang terakhir dilakukannya validasi dan penetapan hasil pendataan.

Pembahasan

Sesuai dengan dasar UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah pasal 229 disebutkan bahwa pemerintah kelurahan, dimana kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi. Untuk melaksanakan tersebut, negara menggunakan APBN yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (Bansos) di dalam APBN. Selanjutnya untuk ditingkat daerah berdasarkan Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang pedoman bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012, Pasal 1 angka 15, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko kecil.

Maka dari itu peran kepala kelurahan beserta jajarannya meliputi RT, RW dan karang taruna disini sangat besar dalam upaya menghadapi pandemi covid -19 sebagai katalisator dalam penyaluran bantuan-bantuan program non –reguler dan bantuan program reguler. Program non reguler seperti bantuan langsung tunai dana desa, bansos sembako, bantuan sosial tunai dan pembebasan biaya listrik sedangkan bantuan dalam bentuk program reguler meliputi kartu prakerja, penambahan peserta program keluarga berencana dan kartu sembako, harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria masyarakat yang mendapatkan bansos tersebut meliputi:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan Panorama
- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi corona
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari dana kelurahan tidak menerima program keluarga harapan, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non tunai hingga kartu prakerja.
- d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari pangan lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa menginformasikannya ke aparat desa
- e. Jika calon memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkap

- f. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung dikantor pos terdekat.

Melalui peran pemerintah kelurahan yaitu lurah dan jajarannya meliputi RT, RW serta karang taruna Adapun Tujuan diselenggarakannya bantuan program non-reguler dan bantuan program reguler ini adalah agar pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang terdampak covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang kami lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, pemerintah kelurahan yang bekerjasama dengan jajarannya meliputi RT, RW serta karang taruna dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai ikhtiar dan upaya akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Panorama sudah berjalan efektif, dikarenakan dengan adanya penyaluran program bansos ini sangat membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang terdampak covid-19.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah kepala kelurahan yang bersinergi dengan RT, RW serta karang taruna diharapkan memberikan motivasi kepada peserta program bansos, sehingga diharapkan kedepan membawa dampak yang baik bagi generasi penerus, serta koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait juga menjadi faktor pendukung guna terwujudnya tujuan dan implementasi program bansos covid-19
2. Bagi peserta program bansos harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, untuk mengikuti kewajibannya sebagai peserta bansos berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang dalam hal ini sesuai dengan peraturan menteri sosial Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Alakhiri, Yusuf. 2020. Analisis Dampak Covid- 19 Bagi Perekonomian dan Sektor Perbankan Syariah Indonesia. Diakses 20 Mei 2020. <https://www.kompasiana.com/alyusuf/5ebb81a6097f36763f19b072/analisis-dampak-covid-19-bagiperekonomian-dan-sektor-perbankan-syariah-diindonesia>.
- Faiz, Ahmad. 2020. Menteri Desa Pemerintah BLT dan Dana Desa Disalurkan Sebelum 24 Mei. Diakses 20 Mei 2020. Nasional.tempo.co
- Husin, Taqwaddin. 2020. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. 21 April. Diakses 20 Mei 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsungtunai-dari-dana-desa>.
- Kusuma, Nugroho. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura. *Dinamika: Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vo. 10 N0. 2.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). Analisis kebijakan publik. Bandar Lampung: AURA
- Purnomo, Diyan., Soeaidy, Mochammad Soleh., & Hadi, Minto. (2014). Analisis kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Malang (Studi pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 Tahun 2008 kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1), 43-44.
- Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Sosial
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Bantuan Sosial



JURNAL STIA BENGKULU

COMMITTE TO ADMINISTRATION
FOR EDUCATION QUALITY

p-ISSN
e-ISSN

Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga